

KOORDINASI VERTIKAL CAMAT DALAM PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGI DI KECAMATAN BULANGO SELATAN KABUPATEN BONE BOLANGO

Olan Harun & Lisda Van Gobel
STIA Bina Taruna Gorontalo

bukujurnalstia@binataruna.ac.id¹ & lisdavangobel69@gmail.com²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui koordinasi vertikal Camat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango. Metode penelitian menggunakan jenis deskriptif pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam kepada sejumlah informan, observasi dan pencatatan data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, komunikasi camat dengan unit yang dipimpinnya belum berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari pola komunikasi camat yang cenderung bersifat satu arah dan memberikan dampak kepada bawahan yang merasa tertekan dalam menerima pesan dari seorang camat yang pada akhirnya akan mempengaruhi produktivitas kerja organisasi. Pengarahan camat kepada unit yang dipimpinnya belum berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari bentuk pengarahan yang diberikan oleh camat kepada bawahannya yang cenderung kaku. Pembinaan camat kepada unit yang dipimpinnya belum berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari intensitas pembimbingan yang sangat jarang dilakukan kepada unit yang dipimpinnya. Selain itu, camat cenderung memberikan perintah tanpa pembimbingan sehingga masih sering terjadi kesalahan kerja.

Disarankan, perlunya seorang Camat Bulango Selatan merubah gaya komunikasi kepada unit kerja yang dipimpinnya dengan komunikasi yang bersifat dialogis. Perlunya seorang Camat Bulango Selatan untuk menggunakan pola pengarahan kepada unit kerja yang dipimpinnya yang lebih bersahabat. Perlunya seorang Camat Bulango Selatan untuk lebih intensif memberikan pembimbingan kepada unit kerja yang dipimpinnya guna mengeliminir kesalahan kerja.

Kata Kunci: Koordinasi; Pelaksanaan; Tugas

PENDAHULUAN

Sebagai negara kesatuan yang sedang berkembang, Indonesia melaksanakan berbagai pembangunan sebagai salah satu usaha untuk

meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyatnya. Pembangunan yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan merupakan pembangunan dari, oleh, dan untuk rakyat yang sejalan dengan tuntutan dan

perkembangan zaman. Hakikat pembangunan nasional bangsa Indonesia adalah mewujudkan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini mengandung pengertian bahwa pembangunan nasional tidak hanya mengejar kemajuan lahiriah ataupun kepuasan batiniah saja melainkan juga keselarasan dan keseimbangan antara keduanya.

Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang dilaksanakan secara berkesinambungan yang mencakup seluruh tatanan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Perkembangan tersebut dilaksanakan secara terarah dan terpadu dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan sebagaimana yang tercantum dalam isi pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinea IV, yaitu Melindungi segenap bangsa Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pembangunan nasional juga dilaksanakan di semua aspek kehidupan berbangsa yaitu meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Oleh sebab itu, dalam setiap upaya pembangunan rakyat harus memperoleh manfaat dari hasil pembangunan tersebut. Pembangunan itu dilaksanakan secara merata seluruh negara Kesatuan Republik Indonesia bukan hanya ditujukan untuk golongan tertentu atau sebagian masyarakat saja, akan

tetapi pembangunan nasional tersebut ditujukan untuk seluruh masyarakat Indonesia dalam rangka perbaikan taraf hidup yang berkeadilan sosial.

Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, maka diperlukan suatu keterpaduan, keserasian, dan keselarasan gerak dalam tindakan dari seluruh unsur aparatur pemerintah dalam pelaksanaan pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan. Untuk tercapainya keterpaduan tersebut maka diperlukan suatu koordinasi. Dalam pelaksanaan koordinasi ini tidak hanya dilaksanakan pada tingkatan tertentu saja tetapi mencakup seluruh tingkatan, mulai dari pusat sampai ke kelurahan dan/atau desa yaitu mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kecamatan, hingga pada Pemerintah Kelurahan/Desa.

Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008, secara eksplisit memberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Implementasi kebijakan otonomi daerah tersebut telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Salah satu perubahan yang sangat esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan. Dalam hal ini kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat

wilayah dalam rangka asas dekonsentrasi, berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam rangka asas desentralisasi. Hal ini merupakan perwujudan dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 221 ayat (1) bahwa Daerah Kabupaten/Kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan.

Sebagai perangkat daerah, Camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan kewenangan dari dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota; dalam hal ini Camat mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat yang meliputi aspek : perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

Selain tugas tersebut, Camat juga berperan sebagai kepala wilayah (wilayah kerja), karena melaksanakan tugas umum pemerintahan di wilayah kecamatan khususnya tugas-tugas atribut dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintahan di wilayah kecamatan, koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, dan yang tak kalah pentingnya adalah koordinasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan.

Sebagaimana diketahui bahwa koordinasi berkenaan dengan upaya mengarahkan, menyeimbangkan,

menyatupadukan, menyelaraskan, mensinkronisasikan, menghubungkan kegiatan dari orang-orang, kelompok orang atau satuan-satuan kerja dalam suatu organisasi sehingga kegiatan yang dilaksanakan menjadi teratur, tertib, lancar, dan mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Namun hal tersebut belum bisa dimaksimalkan oleh seluruh camat yang ada di Indonesia.

Salah satunya adalah Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango, dimana camat sebagai pimpinan tertinggi di dalam unit kerjanya belum mampu melakukan upaya koordinasi dengan seluruh unit-unit kerja lainnya ataupun unit kerja yang dipimpinnya sehingga masih banyak pekerjaan yang tidak terselesaikan secara tepat waktu, banyak pekerjaan yang terbengkalai dan seringkali terjadi kesalahpahaman kerja (*miss communication*) antara bawahan dengan pimpinan. Hal ini ditunjukkan oleh indikasi minimnya koordinasi yang bersifat vertikal untuk menyelaraskan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dimana camat cenderung pasif di dalam melakukan komunikasi dengan para aparat yang menjadi bawahan sehingga berdampak pada sulitnya menyelaraskan kegiatan antar unit yang satu dengan unit lainnya. Hal ini terlihat dari kurangnya rapat atau pertemuan resmi yang dilakukan oleh camat guna membahas tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi seorang Camat. Selain itu kurangnya pengarahan camat kepada unit-unit kerja yang dipimpinnya sehingga masih sering terjadi kesalahpahaman dan ketidaksesuaian perintah dan pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi. Terakhir adalah kurangnya kegiatan pembinaan atau *coaching* yang dilakukan oleh Camat kepada bawahannya dan kurang memberikan teguran kepada bawahannya yang melakukan kesalahan sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi menjadi terhambat.

PERMASALAHAN

Adapun rumusan masalah ini disesuaikan dengan latarbelakang dan identifikasi masalah sebelumnya yaitu; Bagaimana Koordinasi Vertikal Camat dalam Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi di Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango?

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Koordinasi Vertikal Camat dalam Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi di Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut;

Manfaat praktis adalah penelitian diharapkan bermanfaat bagi pemerintah setempat.

Manfaat teoritis adalah sebagai kajian baru dalam pengembangan ilmu Administrasi Publik khususnya mengenai koordinasi vertikal camat dalam pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi di Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif metode kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif yaitu jenis penelitian berdasarkan pendekatan yang digunakan yakni penelitian yang dilakukan pada kondisi obyek yang alami, dimana peneliti sebagai instrumen utamanya/instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan hingga datanya jenuh dan menghasilkan data bersifat deskriptif (Wirartha, 2006 : 134).

Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian mengenai Koordinasi Vertikal Camat dalam Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi di Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango meliputi:

Komunikasi

Komunikasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah bentuk persuasif seorang Camat Bulango Selatan kepada unit kerja yang dipimpinnya sebagai upaya penyelarasan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Pengarahan

Pengarahan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pemberian arahan yang dilakukan oleh Camat Bulango Selatan kepada unit kerja yang dipimpinnya guna menyelaraskan tugas pokok dan fungsinya.

Pembinaan

Pembinaan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah bentuk

pembimbingan yang dilakukan oleh Camat Bulango Selatan kepada unit kerja yang dipimpinnya guna menyalurkan tugas pokok dan fungsinya.

Untuk pengumpulan data yang diperlukan pada penelitian ini, maka dilakukan melalui cara sebagai berikut: Observasi adalah pengumpulan data melalui pengamatan langsung yang dilakukan peneliti terhadap objek penelitian. Setiap data yang diamati tidak sekedar dilihat tetapi langsung diperhatikan, jika perlu ditanya dan dicatat segala sesuatunya. Metode wawancara merupakan metode yang paling luas digunakan dimana-mana untuk memperoleh informasi dari orang banyak. Menurut Arikunto (dalam Rahmawati, 2009:25) menyatakan bahwa wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan informasi yang ingin didapatkan dan terwawancara menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dialog atau percakapan ditunjukkan melalui kegiatan ini. Terdapat *feedback* atau respons antara orang yang satu dengan yang lain. Dokumen yaitu menghimpun data dan informasi melalui dokumen atau catatan-catatan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Adapun teknik yang digunakan untuk menganalisis data mengacu pada pendapat Menurut Miles dan Huberman(dalam Sugiyono, 2013:337), yaitu: Reduksi data; Penyajian data, dan Verifikasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sebagai perangkat daerah, Camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan kewenangan dari dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota; dalam hal ini Camat mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat. Selain tugas tersebut, Camat juga berperan sebagai kepala wilayah (wilayah kerja), karena melaksanakan tugas umum pemerintahan di wilayah kecamatan khususnya tugas-tugas atribut dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap unit kerja yang dipimpinnya.

Berikut uraian pembahasan terkait dengan koordinasi vertikal Camat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango, dengan fokus penelitian; komunikasi, pengarahan, dan pembinaan.

Komunikasi adalah proses pengiriman dan penerimaan informasi atau pesan antara dua individu atau lebih dengan efektif sehingga bisa dipahami dengan mudah. Dalam kehidupan sehari-hari, semua orang pasti akan melakukannya, mulai dari berbicara, menulis surat, menelpon, komunikasi suami istri, sesama teman, rekan kerja maupun antara pimpinan dan atasan atau sebaliknya, itu semua termasuk ke dalam komunikasi.

Sementara itu, komunikasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah bentuk persuasif seorang Camat Bulango Selatan kepada unit kerja yang

dipimpinnya sebagai upaya penyelarasan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Dari hasil penelitian dan analisis penulis, dapat diketahui bahwa, komunikasi camat dengan unit yang dipimpinnya belum berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari pola komunikasi camat yang cenderung bersifat satu arah dan memberikan dampak kepada bawahan yang merasa tertekan dalam menerima pesan dari seorang camat yang pada akhirnya akan mempengaruhi produktivitas kerja organisasi. Hal ini tentu saja tidak sejalan dengan tujuan komunikasi (Manullang) yang mengatakan bahwa komunikasi merupakan bentuk koordinasi yang bertujuan untuk menyatukan kegiatan-kegiatan sehingga diperoleh keserasian dalam pelaksanaan tugas atau kerja untuk mencapai tujuan bersama secara efisien.

Pengarahan (*Direction*) adalah keinginan untuk membuat orang lain mengikuti keinginannya dengan menggunakan kekuatan pribadi atau kekuasaan jabatan secara efektif dan pada tempatnya demi kepentingan jangka panjang organisasi. Termasuk di dalamnya memberitahukan orang lain apa yang harus dilakukan dengan nada yang bervariasi mulai dari nada tegas sampai meminta atau bahkan mengancam. Tujuannya adalah agar tugas-tugas dapat terselesaikan dengan baik. Para ahli banyak berpendapat kalau suatu pengarahan merupakan fungsi terpenting dalam manajemen. Karena merupakan fungsi terpenting maka hendaknya pengarahan ini benar-benar dilakukan dengan baik oleh seorang pemimpin.

Adapun pengarahan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pemberian arahan yang dilakukan oleh Camat Bulango Selatan kepada unit kerja yang dipimpinnya guna menyelaraskan tugas pokok dan fungsinya. Dari hasil penelitian dan analisis penulis, dapat diketahui bahwa pengarahan camat kepada unit yang dipimpinnya belum berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari bentuk pengarahan yang diberikan oleh camat kepada bawahannya yang cenderung kaku serta tidak adanya dampak positif dari kegiatan pengarahan yang dilakukan oleh seorang camat seperti peningkatan produktivitas kerja, bahkan malah sebaliknya dimana bawahan merasa tertekan dan terintimidasi sehingga kinerja bawahan menjadi menurun. Jangan sampai manajer seperti kata Winardi (2010:162), kadang-kadang dinyatakan orang sebagai : “*The Management of people, not things*”, bahwa sang manajer hanya perlu menggerakkan orang-orang lain sesuai dengan keinginannya.

Pembinaan sendiri adalah sebuah proses sistematis untuk mengubah perilaku kerja seorang/sekelompok pegawai dalam usaha meningkatkan kinerja organisasi. Pembinaan terkait dengan keterampilan dan kemampuan yang diperlukan untuk pekerjaan yang sekarang dilakukan. Pembinaan berorientasi ke masa sekarang dan membantu pegawai untuk menguasai keterampilan dan kemampuan (kompetensi) yang spesifik untuk berhasil dalam pekerjaannya.

Demikian halnya dalam penelitian ini, yang dimaksudkan dengan

pembinaan adalah bentuk pembimbingan yang dilakukan oleh Camat Bulango Selatan kepada unit kerja yang dipimpinnya guna menyalurkan tugas pokok dan fungsinya. Dari hasil penelitian dan analisis penulis, dapat diketahui bahwa pembinaan camat kepada unit yang dipimpinnya belum berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari intensitas pembimbingan yang sangat jarang dilakukan kepada unit yang dipimpinnya. Selain itu, camat cenderung memberikan perintah tanpa pembimbingan sehingga masih sering terjadi kesalahan kerja. Berbeda dengan (Poerwadarmita, 2012;62) yang mengatakan bahwa pembinaan disebut sebagai sebuah perbaikan terhadap pola kehidupan yang direncanakan sehingga pembinaan harus menghasilkan sesuatu yang lebih baik bukan sebaliknya.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa, koordinasi vertikal Camat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango belum optimal. Hal tersebut terlihat dari gaya atau penggunaan komunikasi camat dalam pelaksanaan tugas yang bersifat dominan atau satu arah, bentuk pengarahan pelaksanaan tugas yang lebih cenderung memberi perintah, serta minimnya pemberian bimbingan dalam pelaksanaan tugas kepada unit kerja yang dipimpinnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Dilihat dari aspek komunikasi, camat dengan unit yang dipimpinnya belum berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari pola komunikasi camat yang cenderung bersifat satu arah dan memberikan dampak kepada bawahan yang merasa tertekan dalam menerima pesan dari seorang camat yang pada akhirnya akan mempengaruhi produktivitas kerja organisasi.

Dilihat dari aspek pengarahan camat kepada unit yang dipimpinnya belum berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari bentuk pengarahan yang diberikan oleh camat kepada bawahannya yang cenderung kaku serta tidak adanya dampak positif dari kegiatan pengarahan yang dilakukan oleh seorang camat seperti peningkatan produktivitas kerja, bahkan malah sebaliknya dimana bawahan merasa tertekan dan terintimidasi sehingga kinerja bawahan menjadi menurun.

Dilihat dari aspek pembinaan camat kepada unit yang dipimpinnya belum berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari intensitas pembimbingan yang sangat jarang dilakukan kepada unit yang dipimpinnya. Selain itu, camat cenderung memberikan perintah tanpa pembimbingan sehingga masih sering terjadi kesalahan kerja.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa, koordinasi vertikal Camat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango belum optimal. Hal tersebut terlihat dari gaya atau penggunaan komunikasi camat dalam pelaksanaan tugas yang bersifat dominan atau satu arah, bentuk pengarahan pelaksanaan tugas yang

lebih cenderung memberi perintah, serta minimnya pemberian bimbingan dalam pelaksanaan tugas kepada unit kerja yang dipimpinnya.

SARAN

Adapun saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

Perlunya seorang Camat Bulango Selatan merubah gaya komunikasi kepada unit kerja yang dipimpinnya dengan komunikasi yang bersifat dialogis

Perlunya seorang Camat Bulango Selatan untuk menggunakan pola pengarahan kepada unit kerja yang dipimpinnya yang lebih bersahabat

Perlunya seorang Camat Bulango Selatan untuk lebih intensif memberikan pembimbingan kepada unit kerja yang dipimpinnya guna mengeliminir kesalahan kerja.

Perlunya mengoptimalkan koordinasi vertikal Camat Bulango Selatan dengan unit kerja yang dipimpinnya dengan cara menggunakan gaya komunikasi yang lebih dialogis, bentuk pengarahan yang lebih bersahabat serta meningkatkan intensitas pembimbingan kepada unit kerja yang dipimpinnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alex, Sobur. 2010. *Psikologi Umum dalam Lintasan Sejarah*. Jakarta: Pustaka Setia.
- A.M. Sardiman. 2007. *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*: Bandung: Rajawali Pers.
- Abdul Aziz, Thohir 2009. *Etika Bekerja Dalam Islam*. Gema Insani Press. Jakarta
- Andi, 2009. *Membangun Aplikasi Bisnis Dengan Netbeans 7*. Yogyakarta: Wahana Komputer.
- Arikunto, Suharsimi. 2009. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi, 2009. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Gunung Agung.
- Atmodowirdjo. 2006. *Peran Disiplin Pada Perilaku dan Prestasi Siswa*. Jakarta: Grasindo.
- Azwar, Saifuddin. 2010. *Penyusunan Skala Psikologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fathoni, Abdurrahmat DV. 2006. *Organisasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: PT. Rineka Cipta.
- Hasibuan, Malayu. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Hasibuan, Malayu. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara:
- Musanef. 2004. *Manajemen Kepegawaian di Indonesia*. Cetakan ke- 2. Jakarta: PT. Gunung Agung.
- Sinamo, Jansen. 2007. *Etos Kerja Profesional di Era Digital Global, Ed 1*. Jakarta: Institut Darma Mahardika.
- Siswanto, Bedjo. 2001. *Manajemen Tenaga Kerja, Rancangan Dalam Pendayagunaan dan Pengembangan Unsur Tenaga Kerja*. Bandung: Sinar Baru

- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Ed. Revisi Cet. Ke -10, Bandung: CV. Alfabeta.
- Suryana. 2006. *Kewirausahaan: Pedoman Praktis, Kiat dan Proses Menuju Sukses*. Jakarta: Salemba Empat
- Wahid Iqbal, dkk. 2006. *Ilmu Keperawatan Komunitas*. Jakarta: CV Sagung Seto.
- Widjaja. 2010. *Otonomi Desa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wirartha, I Made. 2006. *Metode Penelitian Sosial ekonomi*, Yogyakarta: PT. Andi Offset.

Dokumen Lain:

- Undang-Undang Dasar 1945 alinea IV.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.